

## **PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI SMK CITRA MEDIKA SRAGEN**

**Luthfi Isna Nur Aini<sup>1</sup>, Claudia Neri Ryanto<sup>2</sup>**  
*Universitas Sebelas Maret*

[luthfi.isna@yahoo.co.id](mailto:luthfi.isna@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [claudianeryyanto@gmail.com](mailto:claudianeryyanto@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAC**

*This article is a scientific paper with explorative methods. The purpose of this scientific article 1) determine planning in financial management Citra Medika vocational schools in Sragen. 2) determine the budget realization in the financial management of the school in SMK Citra Medika Sragen. 3) determine the supervision in the financial management of the school in SMK Citra Medika Sragen. Financing and financial management in the management system is the input and output of the process to produce the quality of education services organized by the school. Financial management processes in vocational Citra Medika Sragen has fully used the principles of financial management of the school in particular the principle of fairness and efficiency. The use of the principle of fairness which is preparing Budgets and the principle of efficiency that is applied internally in the form of realization of revenue and expenditure budget of the school, while externally the benefits received and costs incurred by students if the students go to school. In financial planning, vocational Citra Medika Sragen is implemented in the form of income and expenditure budget plan school adapted to the purpose, vision, mission and objectives of the school, while the realization of revenue and expenditure of school funds refer to the planning that has been designed in the budget. Accountability of the use of school finances are reported in the form of a comprehensive financial report mainly for the elderly and reported to the Annual General Meeting by the principal who is in charge.*

*Keywords: School Financial Planning, Realization, financial accountability of schools*

### **ABSTRAK**

Artikel ini merupakan karya ilmiah dengan metode eksploratif. Tujuan artikel ilmiah ini 1) mengetahui perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen. 2) mengetahui realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen. 3) mengetahui pengawasan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen. Pembiayaan dan pengelolaan keuangan dalam sistem manajemen merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Proses pengelolaan keuangan yang terdapat di SMK Citra Medika Sragen sudah sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah khususnya prinsip keadilan dan efisiensi. Penggunaan prinsip keadilan yaitu menyusun RAPBS dan prinsip efisiensi yaitu diterapkan secara internal berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah, sedangkan secara eksternal dalam manfaat yang diterima serta biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik apabila peserta didik bersekolah. Pada perencanaan keuangan, di SMK Citra Medika Sragen diimplementasikan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disesuaikan dengan tujuan, visi, misi, serta tujuan sekolah, sedangkan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dirancang dalam RAPBS. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang komprehensif terutama untuk orang tua dan dilaporkan pada Rapat Umum Tahunan oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab.

**Kata Kunci :** Perencanaan keuangan Sekolah , Realisasi, Pertanggungjawaban keuangan sekolah.

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di segala bidang akan sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset bangsa. Dalam upaya mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki, maka dapat dilakukan melalui pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Trilling & Fadel (2009) menyatakan bahwa pada era global ini yang terpenting adalah bagaimana memfungsikan pendidikan sebagai sebuah proses menyiapkan peserta didik agar sukses menempuh kehidupan di masa depan. Kemampuan untuk menghadapi masa depan itulah yang perlu ditumbuhkembangkan dalam proses pendidikan.

Salah satu lembaga jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusan untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional. Hal tersebut sejalan dengan tujuan khusus SMK, yaitu (1) menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati, (2) membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati, dan (3) membekali peserta didik dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengingat pentingnya peran pendidikan khususnya sekolah kejuruan, maka pihak sekolah diharapkan meningkatkan kualitas mutu pendidikan bagi peserta didik.

Menurut Valentin, et al. (2007), peningkatan kualitas pendidikan harus didukung dengan adanya dana, sumber daya manusia, dan material. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, sumber dana sekolah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana keuangan sekolah mengacu pada pengelolaan keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan/daerah) harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sehingga, dana yang dikelola oleh sekolah mengacu pada prinsip pengelolaan dana pendidikan guna mencapai kualitas pelayanan pendidikan yang optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membuat suatu laporan observasi terkait pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen. Alasan penulis tertarik dengan SMK Citra Medika, yaitu proses dalam pengelolaan keuangan yang terdapat di sekolah ini sudah sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah khususnya prinsip keadilan dan efisiensi. Penggunaan prinsip keadilan yaitu menyusun RAPBS dan prinsip efisiensi yaitu diterapkan secara internal berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah, sedangkan secara eksternal dalam manfaat yang diterima serta biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik apabila peserta didik bersekolah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen?
2. Bagaimana realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen?
3. Bagaimana pengawasan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen.
2. Untuk mengetahui realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen.

3. Untuk mengetahui pengawasan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Pengelola keuangan sekolah merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan yang ada di suatu sekolah. Kepala sekolah selaku manajer bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di sekolah. Menurut Koross, Ngrawe, & Sang (2009) bahwa manajemen sebuah sekolah menengah adalah tanggung jawab seorang kepala sekolah yang ditunjuk melalui jasa oleh Departemen Pendidikan Manajemen keuangan sekolah dan berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.

Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Menurut Mestry & Tom (2009), pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen. Sejalan dengan Mestry & Tom, bahwa manajemen anggaran atau biaya sekolah sebagai proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah (Sutomo, 2011:67).

Menurut Suryana (2008), sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orangtua atau peserta didik; dan (3) masyarakat. Proses pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII yaitu melalui: (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (4) Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

##### **2. Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Perencanaan keuangan sekolah terdapat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Hal ini sejalan dengan Clarke (2007); Du Preez, et. al (2003) dalam Kaguri, Njati, & Thiaine (2014), bahwa perencanaan keuangan sekolah biasanya dimulai dengan penyusunan anggaran, yang mana penganggaran adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis yang biasanya ditandai dengan fase seperti, perencanaan, penilaian kebutuhan dan prioritas pengaturan. Penganggaran adalah proses ke depan yang harus dipandu oleh visi sekolah untuk masa depan dan penilaian yang realistis dari risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan sekolah untuk menyusun RAPBS, yakni rencana kerja tahunan yang memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS setidaknya meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.

### **3. Realisasi dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dirancang dalam RAPBS supaya mekanisme yang ditempuh secara benar, efektif, dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab IX Pasal 62 tentang Standar Nasional Pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa realisasi pengeluaran dana pendidikan dalam biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi dalam satuan pendidikan berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.

### **4. Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Berk & Demarzo (2008) berpendapat bahwa pemisahan kepemilikan dan pengawasan memungkinkan kubu manajemen menghadapi sedikit ancaman dipecat dan diganti. Dalam hal ini manajer bebas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pihak manajer sendiri, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri manajer sendiri tanpa memperhatikan pihak investor. Oleh karena itu pengawasan adalah langkah terakhir penting dalam proses manajemen untuk memastikan bahwa hal-hal berjalan sesuai rencana dan target yang tidak realistis dapat direvisi. Sebagai langkah terakhir dalam proses manajemen, pengawasan merupakan aspek penting untuk perencanaan selanjutnya. Sedangkan menurut Cole & Kelly (2011) dalam Kaguri, Njati, Thiaine (2014), menyatakan bahwa tujuan utama dari fungsi pengawasan manajemen adalah untuk mengukur kinerja terhadap tujuan, sasaran, dan standar dengan memungkinkan tindakan korektif yang harus diambil dalam perencanaan selanjutnya. Tujuan utama dari pengawasan adalah menetapkan rencana bisnis jangka pendek, menentukan kemajuan menuju pencapaian rencana jangka pendek, memastikan koordinasi pada organisasi, mendelegasikan tanggung jawab terukur untuk manajer tanpa kehilangan kontrol dan memberikan fleksibilitas yang dikendalikan untuk memenuhi perubahan jangka pendek.

Program pengawasan di sekolah tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran saja, tetapi pengawasan dan kontrol dilaksanakan secara menyeluruh untuk setiap program dan kegiatan pendidikan di sekolah. Hal ini dilakukan agar sekolah dapat terus menerus mengevaluasi diri untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut secara umum dapat terlaksana. Pengawasan juga merupakan bantuan dalam pengembangan untuk memperoleh kondisi yang lebih baik, terutama bantuan untuk memperbaiki dan bantuan secara profesional untuk memperbaiki kinerja. Sesuai Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan Para Kepala Sekolah menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sebagai pertanggungjawaban anggaran, Laporan Tahunan Sekolah dibahas dalam forum komite sekolah. Meliputi aspek-aspek apa yang perlu dilaporkan, bagaimana format laporannya, dan siapa/gugus tugas mana yang melakukannya dan perlu dibahas lebih lanjut. Laporan tahunan sekolah sangat bermanfaat bagi sekolah sendiri dan para *stakeholdernya*. Laporan Tahunan Sekolah merupakan kesempatan bagi sekolah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* sekolah (khususnya orang tua).

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa (Arikunto: 2006,7), sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu (1) wawancara terbuka pada kepala sekolah SMK Citra Medika Sragen. (2) observasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen. (3) catatan lapangan berupa hasil wawancara antara penulis dengan kepala sekolah SMK Citra Medika Sragen (4) dokumentasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Hubungan antara Teori dengan Fenomena di Sekolah**

#### **1. Perencanaan dalam Pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen**

Pengelolaan keuangan sekolah yang penulis teliti adalah di SMK Citra Medika Sragen yang terletak di Jl. Kaswari, Bagan RT 03 RW 01, Nglorog, Sragen. Sekolah ini berdiri pada 04 April 2013 dibawah yayasan Internusa Surakarta dengan ketua yayasan Drs. Singgih Purnomo, M.M dan kepala sekolah Nano Priyanto, S.E. Perencanaan keuangan sekolah diimplementasikan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disesuaikan dengan tujuan, visi, misi, dan tujuan sekolah. Menurut Barasa (2009), Okumbe (2001) dalam Kaguri, Njati, Thiaine (2014), menyatakan bahwa manajemen keuangan dalam pendidikan adalah berkaitan dengan biaya pendidikan, sumber pendapatan untuk memenuhi biaya pendidikan dan pengeluaran dari pendapatan secara objektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanpa sumber daya keuangan yang memadai, lembaga tidak dapat melaksanakan tugas-tugas secara efektif. Dana harus tersedia untuk menjalankan departemen yang berbeda dari sekolah. Dana yang tersedia akan digunakan untuk membeli peralatan belajar mengajar yang diperlukan seperti kapur, buku pelajaran, membayar staf dukungan dan bangunan dan perbaikan infrastruktur.

Menurut Okumbe (2011) dalam Kaguri, Njati, Thiaine (2014), dalam penyusunan anggaran, kepala sekolah harus kerjasama dengan BOG, orang tua, guru dan karyawan sekolah lainnya. Oboegbulem & Kalu (2013) berpendapat bahwa, penganggaran dapat mencegah pemborosan atau pengeluaran sembrono terkait dengan dana yang diberikan untuk berbagai layanan pendidikan. Alasannya adalah bahwa pihak sekolah dipaksa untuk mengikuti perkiraan yang tepat dana belanja. Penganggaran memiliki fungsi teknis pengeluaran otorisasi dan berfungsi sebagai mikroskop dalam analisis rinci. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan sekolah untuk menyusun RAPBS, yakni rencana kerja tahunan yang memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun.

Berdasarkan teori tersebut, perencanaan yang dilakukan oleh sekolah di SMK Citra Medika Sragen, terutama menyangkut keuangan sekolah yang mana diimplementasikan dalam bentuk RAPBS yang disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan komite sekolah dan mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah.

#### **2. Realisasi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen**

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dirancang dalam RAPBS supaya mekanisme yang ditempuh secara benar, efektif, dan efisien. Menurut Lewin (2008) dalam Kaguri, Njati, Thiaine (2014), proyeksi pembiayaan diperlukan untuk ekspansi yang signifikan untuk pendidikan termasuk terhadap siklus pendidikan dasar 9 atau 10 tahun yang realitasnya dana tidak dapat digunakan untuk pemenuhan pendidikan khususya untuk pendaftaran peserta didik baru. Realisasi masukan sering digunakan dalam kegiatan jangka pendek, yaitu untuk meningkatkan ukuran kelas, kekurangan buku teks, perbaikan perpustakaan dan fasilitas serta digunakan untuk mensponsori manajer pendidikan lokakarya dan seminar

yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum dan tindak lanjut (Kaguri, Njati, Thiaine, 2014).

Berdasarkan teori di atas, alokasi anggaran yang digunakan di SMK Citra Medika Sragen telah disesuaikan dengan petunjuk teknis BOS yang tertera pada RAPBS pada tahun tersebut dan digunakan untuk belanja bahan praktik, alat praktik, pembiayaan kegiatan siswa, dan pengembangan mutu siswa dan guru.

Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan sekolah, SMK Citra Medika Sragen telah menerapkan prinsip keadilan dan efisien, dimana prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Kesempatan tersebut antara lain, (1) pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, (2) akses pendidikan kepada calon dan atau peserta didik, (3) kesempatan dalam melanjutkan pendidikan (Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Menurut Fattah (2012:36), prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat diimplementasikan dengan efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal mengukur (1) rata-rata lama belajar yang dihitung dengan cara jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu *kohort* (kelompok belajar) dibagi dengan jumlah lulusan dalam *kohort* tersebut dan (2) *input-output ratio* yang dihitung dengan membandingkan dengan siswa yang diluluskan dan siswa yang diterima dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan lulus. Perbandingan antara biaya input pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar sebagai konsep efisiensi internal juga menekankan pada pemberian rangsangan yang dapat memotivasi perilaku siswa, guru dan kepala sekolah. Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Efisiensi ini bertujuan untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan, juga pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan.

### **3. Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMK Citra Medika Sragen**

Pengawasan adalah langkah terakhir dan penting dalam proses manajemen untuk memastikan bahwa hal-hal berjalan sesuai rencana serta target yang tidak realistis dapat direvisi. Menurut Cole & Kelly (2011) dalam Kaguri, Njati, Thiaine (2014), menyatakan bahwa tujuan utama dari fungsi pengawasan manajemen adalah untuk mengukur kinerja terhadap tujuan, sasaran, dan standar dengan memungkinkan tindakan korektif yang harus diambil dalam perencanaan selanjutnya. Tujuan utama dari pengawasan adalah menetapkan rencana bisnis jangka pendek, menentukan kemajuan menuju pencapaian rencana jangka pendek, memastikan koordinasi pada organisasi, mendelegasikan tanggung jawab terukur untuk manajer tanpa kehilangan kontrol dan memberikan fleksibilitas yang dikendalikan untuk memenuhi perubahan jangka pendek.

Menurut Kaguri, Njati, Thiaine (2014), pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah ditujukan kepada komite dengan melaporkan secara berkala oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab untuk manajemen keuangan dan penganggaran. Pada beberapa sekolah upaya dilakukan untuk membuat laporan keuangan yang komprehensif terutama untuk orang tua dan dilaporkan pada Rapat Umum Tahunan.

Berdasarkan teori di atas, di SMK Citra Medika Sragen Bentuk pengawasan dari pemerintah terkait dengan pengelolaan dana sekolah dilakukan oleh inspektorat dan dinas setahun sekali untuk memeriksa terkait dengan bukti fisik keuangan apakah sudah sesuai dengan prosedur, sedangkan bentuk pengawasan internal yaitu dilakukan oleh pihak yayasan. Bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap keuangan sekolah adalah ditujukan kepada komite sekolah, dinas pendidikan dan yayasan dalam rapat umum tahunan sekolah.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai hubungan antara teori-teori pengelolaan keuangan sekolah dengan fenomena yang ada di SMK Citra Medika Sragen, dapat diketahui bahwa perencanaan keuangan sekolah dapat diimplementasikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah dalam bentuk RAPBS, disusun dengan melibatkan pihak komite sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan sekolah untuk menyusun RAPBS, yakni rencana kerja tahunan yang memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dirancang dalam RAPBS. Alokasi anggaran yang digunakan telah disesuaikan dengan petunjuk teknis BOS yang tertera pada RAPBS pada tahun tersebut dan direalisasikan untuk belanja bahan praktik, alat praktik, pembiayaan kegiatan siswa, dan pengembangan mutu siswa dan guru. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan.

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, untuk mewujudkan kualitas yang bermutu, maka harus dilandaskan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam pengelolaan keuangan sekolah, salah satunya adalah penerapan prinsip keadilan dan efisien, dimana prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah berupa merencanakan pendapatan, alokasi keuangan dan pemberian pelayanan yang optimal kepada siswa, guru, karyawan sebagai bentuk pemerataan pendidikan. Selanjutnya prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah berupa pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Menurut Cole & Kelly (2011) dalam Kaguri, Njati, Thiaine (2014), menyatakan bahwa tujuan utama dari fungsi pengawasan manajemen adalah untuk mengukur kinerja terhadap tujuan, sasaran, dan standar dengan memungkinkan tindakan korektif yang harus diambil dalam perencanaan selanjutnya. Bentuk pengawasan dapat dilakukan oleh inspektorat dan dinas pendidikan dengan menilik ke sekolah setiap setahun sekali untuk memeriksa terkait dengan bukti fisik keuangan apakah sudah sesuai dengan prosedur, sedangkan bentuk pengawasan internal yaitu dilakukan oleh pihak yayasan sekolah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah atas apa yang dianggarkan dan direalisasikan ditujukan kepada komite sekolah, dinas pendidikan dan yayasan dalam rapat umum tahunan sekolah. Hal ini sesuai dengan teori Kaguri, Njati, Thiaine (2014), pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah ditujukan kepada komite dengan melaporkan secara berkala oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab untuk manajemen keuangan dan penganggaran.

## **IV. KESIMPULAN**

1. Perencanaan pengelolaan keuangan sekolah di SMK Citra Medika Sragen diimplementasikan dalam bentuk RAPBS yang disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan komite sekolah dan mengacu pada visi dan misi sekolah.
2. Realisasi pengelolaan keuangan sekolah di Citra Medika Sragen telah disesuaikan dengan petunjuk teknis BOS yang tertera pada RAPBS pada tahun tersebut dan digunakan untuk belanja bahan praktik, alat praktik, pembiayaan kegiatan siswa, dan pengembangan mutu siswa dan guru serta telah menerapkan prinsip keadilan dan efisien dalam pengelolaan keuangan sekolah.
3. Bentuk pengawasan terkait pengelolaan dana sekolah dilakukan oleh inspektorat dan dinas pendidikan setiap setahun sekali dan bentuk pengawasan internal yaitu dilakukan oleh pihak yayasan. Pertanggungjawaban sekolah terhadap keuangan sekolah adalah ditujukan kepada komite, dinas pendidikan dan yayasan dalam rapat umum tahunan sekolah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Dewi Kusuma Wardhani, M.Si, selaku ketua program studi Magister Pendidikan Ekonomi dan Drs. Sunarto, MM selaku ketua program studi Pendidikan Ekonomi atas motivasi dan inspirasi yang diberikan beliau kepada penulis dan penulis juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari teman-teman MPE 2016.

## REFERENSI

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Berk, J. and Demarzo, P. (2008). *Financial Management 3rd Edition*. New Delhi: Baba Barkhanath Printers
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Kaguri, M., Njati, I. C., & Thiaine, K. S. (2014). Financial Management Challenges Facing Implementation of Free Day Secondary Education in Imenti North District, Kenya. *Journal of Business and Management*, 16 (1) 55-78.
- Koross, P.K., Ngware, M. W., & Sang, A. K. (2009). Principals' and students' perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in Kenya. *Journal of Quality Assurance in Education*, 17 (1) 61-78.
- Mestry, R. & Tom, B. (2009). *Financial School Management Explained*. Cape Town: Pearson Education South Africa.
- Oboegbulem, A. I., & Kalu, F. A. (2013). Budgeting Practices of Principals of Secondary Schools in South-East Geo-Political Zone of Nigeria. *Journal of Education and Practice*, 4 (22) 194-204.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan Para Kepala Sekolah
- Sutomo. (2011). *Manajemen Sekolah*. Semarang: UPT Unnes Press.
- Suryana, D. (2008). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Erlangga.
- Trilling, B. & Fadel, C. (2009). *21<sup>st</sup> century skills: learning for life in our times*. San Francisco: John Willey & Sons, Inc.
- Valentin, H. C. , Burciu, A., & Cioban, G. (2007). Implementation of the System of the Management of Education Quality, Basic Requirement for E.U. Integration. (Online) diakses pada tanggal 13 Desember 2016. ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1071866](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1071866)).